



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan  
Telp (021) 5264517-18 Faksimili (021) 5205310**

Nomor : PPE.1.PR.01.02-90  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Capaian Target B06 atau Semester I Tahun 2021  
Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia 2020-2022

13 Juli 2021

Yth.  
Kepala Biro Perencanaan  
Kementerian Hukum dan HAM  
di  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor SEK.1-PR.04.05-205 tanggal 6 Juli 2021 hal Permohonan Data Capaian Target B06 atau Semester I Tahun 2021 Rencana Aksi Nasional *Open Government* Indonesia 2020-2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tidak menyampaikan Data Dukung B06 terkait kegiatan Prioritas Pelibatan Masyarakat Sipil dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (RUU KKR) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat.

Hal ini dikarenakan pada tahun 2021, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tidak melakukan penyusunan RUU tersebut, dimana Naskah Akademik RUU KKR hasil penyusunan Direktorat Jenderal HAM dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) belum disampaikan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil koordinasi Kami dengan Direktorat Jenderal HAM dan BPHN, terdapat beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Draf Naskah Akademik (NA) RUU KKR disusun oleh Direktorat Jenderal HAM selaku pemrakarsa, dimana dalam rapat penyusunan draf NA dimaksud pemrakarsa melibatkan BPHN dan Kementerian/Lembaga terkait;
2. Pada tanggal 14 April 2021 dalam rapat pimpinan Direktorat Jenderal HAM salah satu hasil rapat adalah menyampaikan draf hasil penyusunan NA kepada BPHN untuk dilakukan penyelarasan dan berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal HAM bahwa saat ini Draf Finalisasi berada di Direktorat Jenderal HAM; dan
3. Direktorat Jenderal HAM selaku pemrakarsa akan menyampaikan NA RUU dimaksud kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan untuk dilakukan tahap penyusunan di tingkat Panitia Antar Kementerian. (Proses penyusunan surat penyampaian NA hasil penyelarasan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal  
Peraturan Perundang-undangan  
Sekretaris,  
  
Priyanto  
NIP. 19620531 1981031001

Tembusan :  
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta 12940

Tlp. +62.21.5253004, Fax. +62.21.5253048

Website : [www.kemkumham.go.id](http://www.kemkumham.go.id), Email: [biroren\\_pap@kemenkumham.go.id](mailto:biroren_pap@kemenkumham.go.id)

Nomor : SEK.1-PR.04.05-205

06 Juli 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Data Capaian Target B06 atau Semester I Tahun 2021  
Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2020 - 2022

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
  2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan & Perundang-undangan;
  3. Sekretaris Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia;
  4. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- di -

Tempat

Menindaklanjuti Surat Direktur Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor: 07963/PP.06.02/Dt.7.2/T/07/2021 Hal Pelaporan Capaian Target B06 atau Semester I Tahun 2021 Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia 2020 – 2022 tanggal 01 Juli 2021, dalam rangka monitoring dan evaluasi implementasi Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) tahun 2020-2022, bersama ini kami mohon perkenan Bapak/Ibu beserta jajaran untuk menyampaikan data dukung capaian Target B06 atau Semester I Tahun 2021 Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) tahun 2020-2022 (Rencana Aksi terlampir). Mohon kiranya Data dukung dimaksud dapat disampaikan kepada Biro Perencanaan paling lambat hari **Jum'at, tanggal 9 Juli 2021** melalui email: [biroren\\_pap@kemenkumham.go.id](mailto:biroren_pap@kemenkumham.go.id) atau [evaluasiren@gmail.com](mailto:evaluasiren@gmail.com).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



a.n. Kepala Biro Perencanaan,  
Kepala Bagian Pemantauan, Analisis,  
dan Pelaporan

Achmad Brahmantyo Machmud  
NIP. 197911142000021001

Tembusan:  
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM

**RENCANA AKSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
OPEN GOVERNMENT INDONESIA (RAN OGI) TAHUN 2020-2022**

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
<b>PRIORITAS NASIONAL: Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan</b>						
<b>Program Prioritas: Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan</b>						
1.	Peraturan pelaksana untuk asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan	Direktorat Jendral Pemasyarakatan		Tersedianya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kemenkumham	Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di setiap tahapan acara peradilan di Ditjen PAS	<p><b>TARGET B06:</b></p> <p>Adanya peraturan teknis terkait pelaksanaan asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di lembaga permasyarakatan.</p> <p><b>TARGET B12:</b></p> <p>Asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas</p> <p><b>TARGET B18:</b></p> <p>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas di</p>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
						<p>lembaga permasyarakatan.</p> <p>TARGET B24:</p> <p>Asesmen pemenuhan kebutuhan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas</p>
<b>PRIORITAS NASIONAL: Penguatan portal informasi terkait bantuan hukum</b>						
<b>Program Prioritas: Penguatan portal informasi terkait bantuan hukum</b>						
2.	Penguatan portal informasi terkait bantuan hukum	Badan Pembinaan Hukum Nasional		Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.	<p>TARGET B06:</p> <p>Tersedianya kesepakatan bersama terkait portal informasi bersama dan sinkronisasi data antara K/L.</p> <p>TARGET B12:</p> <p>Penyusunan rancangan pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.</p>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
						<p>TARGET B18:</p> <p>Terlaksananya pengembangan portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.</p> <p>TARGET B24:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya uji coba dan evaluasi portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi</li> <li>Tersedianya portal informasi bantuan hukum yang terbuka dan terintegrasi.</li> </ol>
<b>PRIORITAS NASIONAL: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum</b>						
<b>Program Prioritas: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum</b>						
3.	Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Kementerian Dalam Negeri	1. Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH).	1. Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH).	<p>TARGET B06:</p> <p>Penjaringan OBH baru yang akan diverifikasi dan diakreditasi (dalam bentuk sosialisasi dan pendataan)</p> <p>TARGET B12:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terlaksananya proses</li> </ol>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
						<p>verifikasi dan akreditasi OBH baru.</p> <p>2. Terlaksananya proses reakreditasi OBH yang sudah ada.</p>
						<p>TARGET B18:</p> <p>Terselenggaranya evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.</p>
						<p>TARGET B24:</p> <p>Adanya rekomendasi sebagai tindak lanjut evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi jumlah pemberi bantuan hukum.</p>
				2. Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.	2. Peningkatan jumlah dan kapasitas paralegal.	<p>TARGET B06:</p> <p>1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal.</p>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
						2. Tersedianya pedoman kurikulum pelatihan paralegal
						TARGET B12: Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Paralegal yang melibatkan OMS
						TARGET B18: Implementasi peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait paralegal yang melibatkan OMS
				3. Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh	3. Terimplementasinya Standar Layanan Bantuan Hukum oleh	TARGET B24: Evaluasi implementasi peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait paralegal yang melibatkan OMS
						TARGET B06: 1. Tersedianya Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
				Organisasi Bantuan Hukum	Organisasi Bantuan Hukum	<p>Standar Layanan Bantuan Hukum.</p> <p>2. Tersedianya Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum</p> <p>TARGET B12:</p> <p>1. Sosialisasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait Standar Layanan Bantuan Hukum.</p> <p>2. Sosialisasi Pedoman Standar Layanan Bantuan Hukum</p> <p>TARGET B18:</p> <p>Implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum</p> <p>TARGET B24:</p> <p>Evaluasi implementasi Standar Layanan Bantuan Hukum</p>
<b>PRIORITAS NASIONAL: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban</b>						
<b>Program Prioritas: Inklusi Kelompok Rentan dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban</b>						
4.	Inklusi Kelompok Rentan	Badan Pembinaan		1. Tersedianya langkah	1. Langkah kebijakan	TARGET B06:



NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
	dan Gender dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Korban	Hukum Nasional		kebijakan bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	bantuan hukum untuk korban terutama kelompok rentan dan perempuan.	<p>Identifikasi permasalahan terkait pemberi bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan berdasarkan hasil :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analisa dan Evaluasi Hukum terkait Akses Pelayanan dan Bantuan Hukum oleh Pusat Analisa dan Evaluasi BPHN;</li> <li>2. Urgensi Perubahan Undang-Undang Bantuan Hukum dalam rangka Akses Atas Keadilan;</li> </ol> <p>TARGET B12:</p> <p>Evaluasi kebijakan bantuan hukum terkait pemberian bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.</p> <p>TARGET B18:</p> <p>Penyusunan draft kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan</p>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
						perempuan.
						TARGET B24:  Tersedianya langkah kebijakan bantuan hukum bagi korban terutama kelompok rentan dan perempuan.
				2. Adanya peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	2. Peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender.	TARGET B06: Penyusunan kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.
						TARGET B12: Sosialisasi kurikulum pelatihan peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender yang melibatkan OMS.  TARGET B18: Pelatihan Tahap I peningkatan

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
						<p>kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender bagi penyelenggara bantuan hukum di daerah</p> <p>TARGET B24:</p> <p>Pelatihan Tahap II peningkatan kapasitas serta kualitas pemberi bantuan hukum yang memiliki perspektif korban, sensitifitas kelompok rentan dan gender bagi penyelenggara bantuan hukum di daerah</p>
<b>PRIORITAS NASIONAL: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi</b>						
<b>Program Prioritas: Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi</b>						
5.	Penguatan Dukungan Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Akses Informasi	Badan Pembinaan Hukum Nasional		Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi	<p>TARGET B06:</p> <p>Terinventarisir dan teridentifikasinya materi/bahan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi.</p>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
						<p>TARGET B12: Proses penyusunan kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi</p> <p>TARGET B18: Tersedianya draft kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi</p> <p>TARGET B24: Tersedianya rekomendasi hasil kajian terkait bantuan hukum dalam penanganan perkara sengketa informasi</p>
PRIORITAS NASIONAL: Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat.						
Program Prioritas: Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat.						
6.	Pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan RUU KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Direktorat Jenderal HAM;</li> <li>▪ BPHN;</li> <li>▪ Direktorat</li> </ul>	Pemerintah Daerah	Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan RUU	Terlaksananya pelibatan komponen masyarakat sipil yang bermakna dalam penyusunan RUU	<p>TARGET B06: Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi,</p>

NO.	KEGIATAN PRIORITAS	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B06, B12, B18, B24
	mendorong efektivitas pemulihan korban pelanggaran HAM yang Berat.	Jenderal Peraturan Perundang-undangan.		KKR	KKR	naskah akademik dan RUU KKR.
						TARGET B12: Terlaksananya pelibatan masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kajian substansi, naskah akademik dan RUU KKR.
						TARGET B18: -
						TARGET B24: -